

**PERKEMBANGAN TEKNIS
SISTEM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN
(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh:

VERA NOVITA MAYASARI
NIM. 11202629/P

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2016**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>)	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ..	14
A. Tinjauan Pustaka	14
1. Pengertian Sistem Informasi	14
2. Sistem Informasi Geografis	15
3. Sistem Informasi Pertanahan	17
4. Pelayanan Pertanahan	18
5. Komputerisasi Kantor Pertanahan.....	19
6. Sistem Basis Data.....	21
7. Sistem <i>Client - Server</i>	24
8. Migrasi Data Pertanahan	25
8. Sistem <i>Backup</i>	26
B. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Format Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	37
	A. Kondisi Geografis dan Administrasi.....	37
	B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.	38
BAB V	PERKEMBANGAN TEKNIS SISTEM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN.....	43
	A. Sistem Manajemen Basis Data.....	43
	1. Tahap Pembangunan Awal	43
	2. Tahap Pengembangan	50
	3. Aplikasi Ajudikasi dan <i>Stand Alone System (SAS)</i>	53
	4. Tahap Implementasi I	56
	5. Tahap Implementasi II	60
	6. Tahap Implementasi III	67
	7. Tahap Implementasi IV	71
	B. Sistem Migrasi	75
	C. Sistem <i>Backup</i>	80
BAB VI	DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNIS SISTEM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN	81
	A. Dampak Positif.....	81
	1. Mengupayakan Tertib Administrasi Pertanahan	81
	2. Membuat Inovasi Layanan Pertanahan	84
	3. Memudahkan Pemeliharaan Data Pertanahan.....	86
	B. Dampak Negatif	87
	1. Kehilangan Data Pertanahan Saat Migrasi Sistem	87
	2. Menyesuaikan SOP yang Berlaku	88
	3. Akses Internet Kurang Memadai	91
	C. Upaya Mengatasi Dampak Perkembangan Teknis Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan Terhadap Pelayanan Pertanahan	91
	1. <i>Back up</i> data Pertanahan	91
	2. Kebijakan yang mendukung penyesuaian aplikasi KKP	95
	3. Perbaikan Akses Internet	95
BAB VII	PENUTUP	97
	A. Kesimpulan	97
	B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

ABSTRACT

Lack of land services which is a manual contained in terms of time efficiency and accuracy of the result. Ministry of ATR/BPN makes a policy to provide a prime service to community by means of establishing land based information through computerized system in land offices. The Land Office of Sleman District is one of land offices carries out land office computerization since initial development stage up to implementation IV stage. This research aims to determine: 1) technical development of land office computerized system and 2) the impact of this technical development of land office computerized system to land services in The Land Office of Sleman District.

Research method used is qualitative method with descriptive approach. Analysis technique was performed by preparing proportional statements logically to answer research questions. First problem analysis was conducted by preparing statements to describe technical development of computerized system in land office. Second problem analysis was conducted by explaining impact of technical development of computerized system on land service.

Based on research result was discovered that: 1) Initial development stage up to implementation I stage, Ministry of ATR/BPN was in collaboration with CIMSA Ig. AIE on 10 March 1997. At this stage software multibase was used for textual and software was used smallword for spatial. The Implementation II stage up to Implementation IV stage, Ministry of ATR/BPN was no longer in cooperation with CIMSA Ig. AIE so LOC term has turned into KKP. At this stage has been started to be managed by PUSDATIN and using software Oracle 10g for textual and software Auto Cad 2009 for Spatial; 2) The impact of technical development of computerized system at land office has been perceived by The Land Office of Sleman District consisting of positive and negative impacts. The positive impacts were attempting land administrative order, creating innovation on land service, and facilitating land data maintenance. The negative impacts were the loss of data during system migration, adjusting applicable SOP and additional production cost.

The benefits of this research for Ministry of ATR/BPN were providing information and input for development of land office computerized system. The benefit for Land Office of Sleman District was providing information on efforts to improved the quality of land records. The benefit for researcher was additional insights and knowledge regarding development of land office computerized system.

Key Words: land office computerization, computerized system, land services

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman merupakan suatu realita yang tidak dapat dihindari. Kebutuhan masyarakat akan segala informasi juga semakin meningkat. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi.¹ Era komputerisasi telah membuka wawasan dalam penyajian informasi dan pengambilan keputusan. Semua instansi baik instansi pemerintah maupun swasta telah menggunakan komputer untuk melaksanakan kegiatannya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sebagai instansi pemerintah, merupakan salah satu pemegang kebijakan di bidang pertanahan. Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting untuk memberikan informasi pertanahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kementerian ATR/BPN mempunyai dua Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 sebagai landasan kelembagaannya.

¹**Indonesia**, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Diktum Menimbang.

Pasal 2 Peraturan Presiden 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, yaitu BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan serta kegiatan pelayanan publik, baik pelayanan kepada masyarakat, badan hukum swasta, sosial, keagamaan serta institusi pemerintah.

Kementerian ATR/BPN sebagai instansi publik mempunyai tugas yang penting sebagai satu-satunya kementerian yang memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat sehingga Kementerian ATR/BPN harus senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.² Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan perbaikan pelayanan.

² **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, Lampiran 1, Bab 1, Pengertian Umum.**

Sisi regulasi, telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3). SP3 merupakan pedoman dalam pelaksanaan layanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.³ Ruang lingkup SP3 meliputi kelompok dan jenis pelayanan, persyaratan, biaya, waktu, prosedur dan pelaporan. Pelayanan pertanahan harus sesuai dengan ketentuan dalam SP3. Adanya pelayanan prima terjadi peningkatan pensertifikatan tanah yang menyebabkan peningkatan volume pekerjaan di Kantor Pertanahan. Peningkatan volume pekerjaan harus diimbangi dengan teknologi yang canggih.

Pelayanan pertanahan secara manual masih banyak kekurangan terutama dalam hal kecepatan pelayanan dan keakuratan hasil proses. Mewujudkan kecepatan dan keakuratan hasil proses memerlukan komputer untuk membantu mempermudah penyelesaian pekerjaan. Kementerian ATR/BPN membuat suatu kebijakan untuk memberikan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara penyelenggaraan informasi berbasis informasi pertanahan yang dikenal dengan istilah *Land Office Computerization* (LOC) atau Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).

Sistem komputerisasi diharapkan mampu mempercepat pelayanan di bidang pertanahan. Tahun 1996-1997 aplikasi sistem informasi digital

³ **Badan Pertanahan Nasional**, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan*, Bab 1, Pasal 1.

semakin dikembangkan di BPN.⁴ Pada periode tersebut mulai diperkenalkan kegiatan LOC yaitu aplikasi sistem informasi digital yang ditunjukkan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan pertanahan di kantor-kantor pertanahan kabupaten/kota.⁵ Percepatan pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dengan cara mengembangkan inovasi sistem informasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Inovasi sistem informasi telah dikembangkan mulai dari LOC *Phase I* hingga KKP Web.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kantor Pertanahan yang melaksanakan KKP sejak awal dimulai tahun 1999.⁶ Perkembangan KKP sudah melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut sampai tahun 2014 sudah mencapai enam tahap. Perubahan dan perkembangan sistem informasi terus dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman demi mewujudkan peningkatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan⁷ di Kementerian ATR/BPN.

Setiap perkembangannya memerlukan penyesuaian antara aplikasi sebelumnya dengan penambahan beberapa fitur sesuai pelayanan dan mengikuti dinamika pelayanan di Kementerian ATR/BPN. Perkembangan sistem komputerisasi juga memiliki dampak yang disebabkan oleh

⁴ Slamet Muryono, "Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi Di Badan Pertanahan Nasional", Laporan Penelitian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2006, hlm.16.

⁵ Slamet Muryono, *loc. cit.*

⁶ Hasil wawancara dengan Administrator Program KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sleman, 26 November 2014.

⁷ Badan Pertanahan Nasional, *op. cit.*, Bab I, Pasal 2.

migrasi data pertanahan. Migrasi data pertanahan menyebabkan banyak data pertanahan yang sebelumnya telah di-*input* menjadi sebagian hilang dalam sistem KKP. Berdasarkan uraian diatas, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

Perkembangan Teknis Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan Dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam 2 (dua) pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teknis sistem komputerisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?
2. Apa dampak perkembangan teknis sistem komputerisasi kantor pertanahan terhadap pelayanan pertanahan?

C. Batasan Masalah

Masalah yang diteliti oleh penulis difokuskan pada:

1. Pembangunan data tekstual dan data spasial KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
2. Data tekstual dan data spasial yang dibahas mulai tahap pembangunan awal (tahun 1999) sampai tahap implementasi IV (tahun 2014).

3. Data tekstual dan data spasial yang dilihat dari sistem manajemen basis data, sistem migrasi dan sistem *backup*.
4. Permohonan pemeliharaan data dan hak tanggungan karena memiliki jumlah permohonan terbanyak di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. perkembangan teknis sistem komputerisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
- b. dampak perkembangan teknis sistem komputerisasi kantor pertanahan terhadap pelayanan pertanahan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan informasi dan bahan masukan kebijakan bagi Kementerian ATR/BPN dalam pengembangan aplikasi terbaru guna percepatan pelayanan dibidang pertanahan.
- b. manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah khasanah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai dampak pelayanan pertanahan ditinjau dari perkembangan teknis sistem komputerisasi kantor pertanahan.

E. Kebaharuan Penelitian (*Novelty*)

Kebaharuan penelitian (*novelty*) ditujukan untuk membandingkan penelitian ini dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai masalah dengan tema yang hampir sama. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk tabel yang memuat antara lain nama peneliti, tahun penelitian, judul penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Secara skematis kebaharuan di sajikan dalam Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Kebaruan Penelitian (*novelty*)

No.	Penulis dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	M. Hady Arman R (2009) Skripsi STPN Perkembangan Sistem Komputerisasi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Di Kantor Pertanahan Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan	a. mengetahui perkembangan sistem komputerisasi pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Makassar. b. mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam perkembangan sistem komputerisasi pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Makassar.	Kualitatif pendekatan deskriptif	a. menunjukkan bahwa perkembangan sistem komputerisasi dapat dilihat dengan adanya presensi pegawai, kamera CCTV Tahun 2007, digitalisasi pelayanan loket (2009), penggunaan aplikasi justisia (2009), Aplikasi LOC Phase 2B (2009). b. dampak perkembangan sistem komputerisasi yakni adanya peningkatan kuantitas pelayanan yang belum signifikan setelah adanya aplikasi LOC Phase IIB
2.	Arie Imawan (2011) Penerapan Komputerisasi Kantor Pertanahan Dalam Usaha Meningkatkan Kualitas Pelayanan	a. mengetahui pengaruh komputerisasi kantor pertanahan dalam usaha peningkatan kualitas	Kualitatif pendekatan deskriptif	a. belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

bersambung

Sambungan Tabel 1

1	2	3	4	5
	<p>Pertanahan (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat).</p>	<p>b. pelayanan mengetahui kendala yang dihadapi pada penerapan KKP di Kantor Pertanahan Kota Solok</p>		<p>b. kendala yang ada disebabkan oleh rentang waktu penerapan komputerisasi yang belum lama dan SDM yang ada masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan teknologi baru</p>
<p>3.</p>	<p>Mahenggar Paulina Puspitasari (2014) Penggunaan Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan Berbasis Web Dalam Rangka Persiapan Menuju Pelayanan Prima (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)</p>	<p>a. mengetahui pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dengan menggunakan aplikasi KKPWeb b. mengetahui aplikasi KKPWeb dapat digunakan untuk mempersiapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar melakukan pelayanan prima.</p>	<p>Kualitatif pendekatan deskriptif</p>	<p>a. semua jenis pelayanan di bidang pertanahan sudah dilayani dengan menggunakan aplikasi KKPWeb dan pelaksanaan pelayanan pertanahan masih belum mencapai maksimal karena pembangunan basis data untuk data spasial masih 20%. b. setelah adanya aplikasi KKPWeb penerapan standar pelayanan menjadi lebih jelas, keterbukaan mengenai biaya, waktu, prosedur dan.</p>

bersambung

Sambungan Tabel 1

1	2	3	4	5
				<p>persyaratan permohonan pendaftaran pelayanan pertanahan menjadi lebih transparan karena telah dipublikasikan</p>
4.	<p>Vera Novita Mayasari (2015) Perkembangan Teknis Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan Dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Pertanahan (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)</p>	<p>a. mengetahui perkembangan teknis sistem komputerisasi kantor pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman b. mengetahui dampak migrasi data pertanahan pada tiap tahap impementasi terhadap pelayanan pertanahan.</p>	<p>Kualitatif pendekatan deskriptif</p>	<p>a. menunjukkan bahwa: 1) tahap pembangunan awal hingga tahap implementasi I menggunakan <i>software multibase</i> untuk tekstual dan <i>software smallword</i> untuk spasial. 2) tahap implementasi II hingga tahap implementasi IV menggunakan <i>software Oracle 10g</i> untuk tekstual dan <i>software Auto Cad 2009</i> untuk spasial b. dampak perkembangan teknis sistem komputerisasi kantor pertanahan dirasakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, antara lain:</p>

bersambung

Sambungan Tabel 1

1	2	3	4	5
				<p>1) dampak positif: mengupayakan tertib administrasi pertanahan, membuat inovasi layanan pertanahan dan mempermudah pemeliharaan data pertanahan.</p> <p>2) dampak negatif: kehilangan data pertanahan saat migrasi sistem, menyesuaikan SOP yang berlaku, bertambah biaya produksi.</p>

Obyek penelitian yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai tujuan dan tempat penelitian. Penelitian M. Hady Arman (2009) mempunyai tujuan mengetahui perkembangan dan dampak KKP pada LOC *Phase* IIB pada Kantor Pertanahan Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian M. Hady Arman yaitu adanya LOC *Phase* IIB di Kantor Pertanahan Kota Makasar belum terlihat peningkatan kuantitas pelayanan yang signifikan.

Penelitian Arie Imawan (2011) mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh dan kendala KKP di Kantor Pertanahan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Hasil dari penelitian Arie Imawan yaitu belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kendala yang dihadapi yaitu SDM yang membutuhkan rentang waktu penyesuaian teknologi baru.

Penelitian Mahenggar Paulina Puspitasari (2014) mempunyai tujuan mengetahui pelaksanaan pelayanan dan aplikasi pada KKP Web untuk mempersiapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar melakukan pelayanan prima. Hasil dari penelitiannya yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sudah melayani semua jenis pelayanan dengan menggunakan KKP Web namun belum maksimal karena pembangunan basis data spasial baru mencapai 20% dan adanya KKP Web di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar membuat pelayanan pertanahan lebih transparan baik dari segi waktu, prosedur maupun biaya.

Penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui perkembangan teknis sistem komputerisasi kantor pertanahan dan dampaknya terhadap pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengetahui perkembangan secara teknis dan dampak sistem komputerisasi kantor pertanahan pada *LOC Phase I*, *LOC Phase IIA*, *LOC Phase IIB*, *KKP Desktop* dan *KKP Web* terhadap pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sedangkan persamaan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti dengan penelitian sebelumnya terdapat pada metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mengalami perkembangan KKP dari tahap pembangunan awal hingga tahap implementasi IV.
 - a. Tahap pembangunan awal hingga tahap implementasi I, Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan CIMSA Ig. AIE tanggal 10 maret 1997. Pada tahap ini, menggunakan *software multibase* untuk tekstual dan *software smallword* untuk spasial.
 - b. Tahap implementasi II sampai tahap implementasi IV, Kementerian ATR/BPN sudah tidak lagi bekerjasama dengan CIMSA Ig. AIE sehingga istilah LOC menjadi KKP. Pada tahapan ini sudah dikelola oleh PUSDATIN dan menggunakan *software Oracle 10g* untuk mengolah data tekstual dan *software Auto Cad 2009* untuk mengolah data spasial.
2. Dampak perkembangan teknis sistem komputerisasi kantor pertanahan dirasakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman antara lain:
 - a. Dampak positif: mengupayakan tertib administrasi pertanahan, memudahkan membuat inovasi layanan pertanahan, dan mempermudah pemeliharaan data pertanahan.
 - b. Dampak negatif: kehilangan data pertanahan saat migrasi sistem, menyesuaikan SOP yang berlaku dan bertambah besar biaya produksi.

Upaya untuk mengatasi dampak perkembangan teknis sistem komputerisasi kantor pertanahan terhadap pelayanan pertanahan antara lain:

- a. Peningkatan kualitas data tekstual maupun spasial;
- b. Peningkatan keterampilan petugas pelaksana;
- c. Kebijakan yang mendukung penyesuaian aplikasi KKP.

B. Saran

1. Upaya untuk mendukung percepatan pelayanan pertanahan, pada tahap implementasi IV sebaiknya ada server tersendiri untuk Kantor Pertanahan yang mempunyai jumlah permohonan yang relatif banyak.
2. Perlu dilakukan upaya evaluasi dan peningkatan pelayanan untuk meningkatkan kualitas data tekstual maupun spasial. Hal tersebut dilakukan guna memperkecil terjadinya sengketa, konflik maupun perkara pertanahan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonim. 2010. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta
- Anwar, Khoirul dan Asianti Oetojo. 2004. *Aplikasi Sistem manajemen Bagi Pemerintah Di Era Otonomi Daerah (SIMDA)*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Sleman dalam Angka (Sleman Regency in Figures 2012/ 2013)*. (tidak diterbitkan). Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional. 2014. *Draft Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar*. (tidak diterbitkan). Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional dan CIMSA Ig. A.I.E. 1998. *Pengantar Komputerisasi Kantor Pertanahan*. (tidak diterbitkan). Jakarta.
- Daryanto. 2010. *Teknik Jaringan Komputer*. Alfabeta: Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Balai Pustaka: Jakarta
- Fathansyah. 1999. *Basis Data*. Informatika: Bandung
- Hikmat, Mahi M. 2011. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Kadir. 1998. *Konsep & Tuntunan Praktis Basis Data*. ANDI: Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Nugroho, Aristiono. 2012. *Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta
- Prahasta, Eddy. 2002. *Sistem Informasi Geografis: Konsep-Konsep Dasar*, Informatika: Bandung

Pusat Data dan Informasi Pertanahan. 2013. *Pengembangan KKP/ Geo KKP*. (tidak diterbitkan). Jakarta.

Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung

Trimono, Soejono. 1987. *Dari Dokumentasi ke Sistem Informasi Manajemen*. Remadja Karya: Bandung

Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Karya Ilmiah

Arman, M. Hadi. 2009. *Skripsi Perkembangan Sistem Komputisasi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan*. (tidak diterbitkan). Yogyakarta.

Imawan, Arie. 2011. *Skripsi Penerapan Komputisasi Kantor Pertanahan Dalam Usaha Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat)*. (tidak diterbitkan). Yogyakarta.

Muryono, Slamet. 2006. *Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi*, Laporan Penelitian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta.

_____. 2012. *Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Pertanahan Berbasis Web di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang*. Jurnal Bhumi Nomor 7 Tahun 2012. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta.

Puspitasari, Mahenggar Paulina. 2014. *Skripsi Penggunaan Aplikasi Komputisasi Kantor Pertanahan Berbasis Web dalam Rangka Persiapan Menuju Pelayanan Prima (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)*. (tidak diterbitkan). Yogyakarta

Suharno dan Sutaryono. 2002. *Pelaksanaan Land Office Komputization (LOC) di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri*. Jurnal Bhumi Nomor 3 Tahun 2002. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta.

Syahrul. 2008. *Pemanfaatan Peranti Lunak Arc View Gis 3.3 Dalam Membangun Basisdata Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta.

Wahyuni. (tanpa tahun). *Menuju Tata Kelola Pertanahan yang Baik (Good Land Governance) dengan Komputerisasi Pelayanan Pertanahan.*

_____. *Sejarah Pengembangan Aplikasi Layanan Pertanahan di BPN.*

Laporan

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. *Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2016.* (tidak diterbitkan). Yogyakarta.

_____. *Nominatif Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2016.* (tidak diterbitkan). Yogyakarta.

_____. *Laporan KKP Web Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2016.* (tidak diterbitkan). Yogyakarta.

_____. *Laporan Perkembangan Kegiatan LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2016.* (tidak diterbitkan). Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* . UU Nomor 11 Tahun 2008.

_____, *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.* UU Nomor 14 Tahun 2008.

_____, *Peraturan Presiden tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang,* Perpres Nomor 17 Tahun 2015.

_____, *Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional,* Perpres Nomor 20 Tahun 2015.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.* Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2012.

Badan Pertanahan Nasional, *Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29-IX-2005 tentang Pengangkatan Panitia Ajudikasi Dan Satuan*

Tugas Dalam Pelaksanaan Land Management And Policy Development Program (LMPDP), Keputusan Kepala BPN Nomor 29-IX-2005.

_____, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.* Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010.

_____, *Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010.* Surat Edaran Kepala BPN RI Nomor 1/SE-100/I/2013

_____, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.* Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013.

Berita Internet

<http://www.bpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Komputerisasi-Layanan-Pertanahan> diakses tanggal 30 November 2014, pukul 14.00 WIB.

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/450/jbptunikompp-gdl-friscaangg-22471-2-babii.pdf> diakses tanggal 5 Januari 2015 pukul 19.30 WIB

<http://doktafia.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/30525/SISTEM+INFORMASI+GEOGRAFIS++1.pdf> diakses tanggal 5 Januari 2014 pukul 19.35 WIB.

<http://klik-oracle.web.id/?p=136> diakses tanggal 5 Januari 2015 pukul 20.00 WIB.

<http://komputermesh.blogspot.com/2014/12/pengertian-server-dan-cara-kerja-server.html> diakses tanggal 30 Maret 2016 pukul 19.15 WIB.

<http://www.bpn.go.id/Program/LARASITA> diakses tanggal 4 April 2016 pukul 22.20 WIB.

<http://udinugroho.blogspot.co.id/2010/07/download-ajd-surveyor.html> diakses tanggal 20 Juni 2016 pukul 08.59 WIB.